

BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR



Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

**JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.17
MAKASSAR**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Diklat Industri Makassar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/Pmk.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Diklat Industri Makassar. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Makassar, 20 Januari 2024

Kepala Balai Diklat Industri Makassar



Baeris Herry, SE.
NIP. 196205121990031005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	iii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	4
II. NERACA	5
III. LAPORAN OPERASIONAL	7
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
A. PENJELASAN UMUM	9
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	22
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	33
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	45
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	54
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.	58

BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.17 MAKASSAR
TELEPON 0411 556617, FAXIMILE 0411 556618

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Audited Balai Diklat Industri Makassar yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, 20 Januari 2024
Kepala Balai Diklat Industri Makassar



Basus Herry, SE.

NIP. 196605121990031005

Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Makassar periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA. 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 47.600.829 atau mencapai 100 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada Periode Semester II TA. 2023 adalah sebesar Rp 35.079.634.311 atau mencapai 99,63 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 35.208.413.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 91.455.788.590, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 831.050; Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar Rp 00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 91.436.226.290; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 18.731.250. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 20.600.835 dan Rp 91.435.187.755.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO. beban. surplus/defisit dari operasi. surplus/defisit dari kegiatan non operasional. surplus/defisit sebelum pos luar biasa. pos luar biasa. dan surplus/defisit-LO. yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 00. sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 36.115.237.409, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (36.115.237.409). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 00. dan sebesar Rp 00. sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (28,754,511,798).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 92.407.657.620 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (36.111.462.508) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 106.959.161 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 35.032.033.482 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 91.435.187.755.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023		% thd Angg	TAHUN 2022
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.	0	47.600.829	100.00	154,000
JUMLAH PENDAPATAN		0	47.600.829	100.00	154,000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	3.600.306.000	3.588.432.730	99,67%	3.352.964.537
Belanja Barang	B.4.	31.071.907.000	30.956.755.481	99,63%	23.546.737.696
Belanja Modal	B.5.	536.200.000	534.446.100	99,67%	1.573.854.595
Belanja Bahan Sosial	B.6.	0	0	0.00	0
JUMLAH BELANJA		35.208.413.000	35.079.634.311	99,63%	28.473.556.828

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR
NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.	0	0
Belanja dibayar dimuka	C.3.	526.050	21,643,629
Pendapatan yang masih harus diterima	C.4.	0	0
Persediaan	C.5.	305.000	1,357,060
Jumlah Aset Lancar		831.050	23,000,689
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TPA/TGR	C.6.	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.7.	0	0
Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.8.	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.9.	65.700.000.000	65,700,000,000
Peralatan dan Mesin	C.10.	19.796.074.849	19,261,628,749
Gedung dan Bangunan	C.11.	31.110.742.828	31,005,742,828
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.12.	1.474.394.626	1,474,394,626
Aset Tetap Lainnya	C.13.	49.700.000	49,700,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.14.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.15.	(26.694.686.013)	(25,118,126,546)
Jumlah Aset Tetap		91.436.226.290	92,373,339,657
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.16.	149,850,000	149,850,000
Aset Lain-lain	C.17.	0	613,455,506
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.18.	(131.118.750)	(682,770,257)
Jumlah Aset Lainnya		18.731.250	80,535,249
JUMLAH ASET		91.455.788.590	92,476,875,595
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.19.	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.20.	20.600.835	69,217,975
Utang yang Belum ditagihkan	C.21.	0	0
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.22.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		20.600.835	69,217,975

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	C.23.	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		20.600.835	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.24.	91.435.187.755	92,407,657,620
JUMLAH EKUITAS		91.435.187.755	92,407,657,620
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		91.455.788.590	92,476,875,595

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3.544.382.680	3,376,679,491
Beban Persediaan	D.3.	2.432.060	193,371,340
Beban Barang dan Jasa	D.4.	18.300.524.610	16,149,201,186
Beban Pemeliharaan	D.5.	523.434.431	372,466,136
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	12.128.976.200	6,860,139,485
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7.	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8.	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	1.615.487.428	1,802,654,160
Beban Penyisihan Pi utang Tak Tertagih	D.10.	0	0
JUMLAH BEBAN		36.115.237.409	28,754,511,798
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(36.115.237.409)	(28,754,511,798)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11.		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		28.000.000	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		24.341.499	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3.658.501	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(36.111.462.508)	(28,754,511,798)
POS LUAR BIASA	D.12.		
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(36.111.462.508)	(28,754,511,798)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2023***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1.	92.407.657.620,	92,650,311,660
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2.	(36.111.462.508,)	(28,754,511,798)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	106.959.161	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	109.118.361	38,454,930
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	(2.159.200)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	35.032.033.482	28,473,402,828
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(972.469.865)	(242,654,040)
EKUITAS AKHIR	E.5	91.435.187.755	92,407,657,620

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Diklat Industri Makassar

Balai Diklat Industri Makassar didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia industri. Organisasi dan tata kerja entitas diatur Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Diklat Industri. Entitas berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.17 Makassar.

Balai Diklat Industri Makassar mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri. Balai Diklat Industri Makassar memiliki fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri meliputi pengolahan rumput laut, kakao dan rumah kemasan. Dengan tugas dan fungsi tersebut diharapkan Balai Diklat Industri Makassar dapat berperan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Balai Diklat Industri Makassar berkomitmen dengan visi **“Menjadi Lembaga Diklat Industri yang Mampu Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Industri.”** Visi tersebut dijabarkan usaha pencapaiannya dengan misi-misi Balai Diklat Industri Makassar yaitu:

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur konsultan, wirausaha dan tenaga kerja industri.

- Melakukan pengembangan jenis dan kurikulum diklat sesuai spesialisasi dan kompetensi BDI Makassar.
- Melakukan kerjasama dengan dunia industri, asosiasi dan kelompok usaha bersama.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Diklat Industri Makassar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari Modul Perbendaharaan yang terkait dengan fungsi Operator, Validator, dan Aproval. SAKTI Modul Operator User General Ledger dan Pelaporan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SAKTI Modul Operator Aset Tetap dan Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Diklat Industri Makassar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca. Laporan

Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Diklat Industri Makassar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Perindustrian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Makassar adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Diklat Industri adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar. Aset Tetap. Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara kualitas piutang

ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari

Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar. aset tetap. dan piutang jangka panjang.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud. tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi. Hak Paten Sederhana. Merk. Desain Industri. Rahasia Dagang. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Paten Biasa. Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan. Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II. Hak	50

Ekonomi Pelaku Pertunjukan. Hak Ekonomi Produser Fonogram.	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan. Balai Diklat Industri Makassar telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk penghematan belanja pemerintah, realokasi anggaran, terdapatnya anggaran yang diblokir serta adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

URAIAN	TAHUN 2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	3.674.000.000,	3.600.306.000,
Belanja Barang	34.550.000.000	31.071.907.000
Belanja Modal	0	536.200.000,
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	38.224.000.000,	35.208.413.000,

*Realisasi
Pendapatan
Rp 47.600.829*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 47.600.829. Balai Diklat Industri Makassar pada Tahun Anggaran 2023 ini tidak memiliki Estimasi Pendapatan atas Pendapatan Negara. Pendapatan Balai Diklat Industri Makassar terdiri dari Pendapatan Pengelolaan BMN. Pendapatan Pendidikan. dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	Realisasi %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	0	28.000.000	100.00%
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0	0	0.00%
Pendapatan Lain-lain	0	19.600.829	100.00%
Jumlah	0	47.600.829	100.00%

Realisasi Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi TA. 2023 tetap 0 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penerimaan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar dimana seluruh kegiatan terkait pendidikan ditanggung APBN. Selain itu, Pendapatan dari Pengelolaan BMN Naik Lebih dari 100% persen karena terdapat penjual aset BMN berupa hasil bongkaran dari sisa renovasi atap aula, sedangkan Pendapatan Lain-lain Balai Diklat Industri Makassar Naik Menjadi Rp 19.600.829 berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja pegawai dan belanja Barang yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

Uraian	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	28.000.000	0	>100.00%
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0	0	0.00%
Pendapatan Lain-lain	19.600.829	154,000	>100%
Jumlah	47.600.829	154,000	>100%

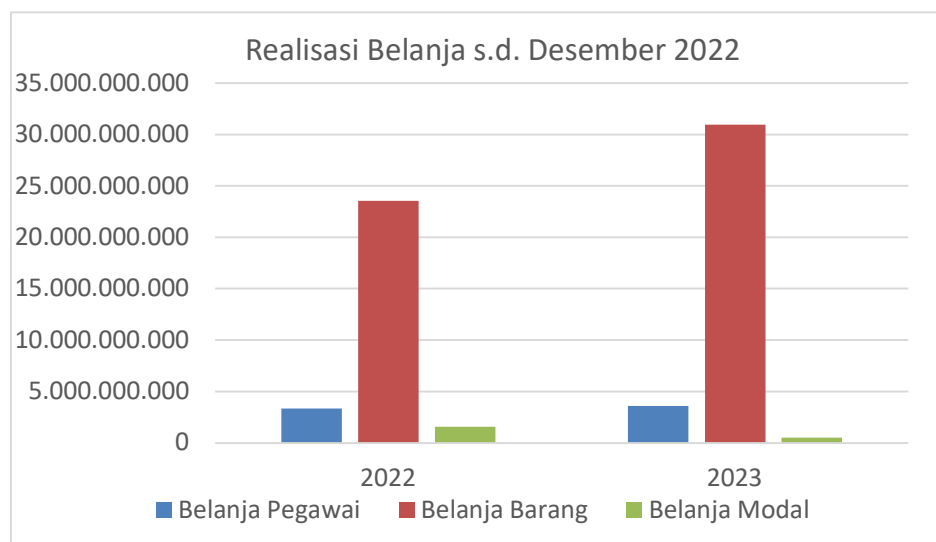
B.2 Belanja

*Realisasi
Belanja
Rp 35.079.634.311*

Realisasi Belanja Balai Diklat Industri Makassar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 35.079.634.311 atau 98,9% dari anggaran belanja sebesar Rp 35.208.413.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

URAIAN	TAHUN 2023		% Real Angg
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	3.600.306.000	3.588.432.730	99,67%
Belanja Barang	31.071.907.000	30.956.755.481	99,63%
Belanja Modal	536.200.000	534.446.100	99,67%
JUMLAH	35.208.413.000,	35.079.634.311,	99,63%



Dibandingkan dengan TA 2022, realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 23% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena realisasi pelaksanaan diklat 3 in 1 yang memiliki porsi besar pada anggaran memiliki output kinerja jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

Uraian Jenis Belanja	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK/(TURUN)
			%
Belanja Pegawai	3.588.432.730	3,352,964,537	7,02%
Belanja Barang	30.956.755.481	23,546,737,696	31,47%
Belanja Modal	534.446.100	1,573,854,595	(66,04%)
Jumlah Belanja	28,473,556,828	28,473,556,828	23,20%

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.588.432.730 dan Rp 3,352,964,537. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja pegawai merupakan biaya yang secara tetap dikeluarkan oleh Balai Diklat Industri Makassar dimana

*Belanja
Pegawai Rp
3.588.432.730*

- perhitungan pada TA 2023 merupakan Realisasi belanja pegawai selama 12 bulan
2. Ada penambahan jumlah pegawai di BDI Makassar.
 3. Ada penyesuaian grade tunjin PNS dan kenaikan tunjin pada jabatan fungsional tertentu.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.803.734.508	1,717,017,936	5,05%
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.785.754.378	1,637,797,051	9,03%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0.00%
Belanja Honorarium	0	0	0.00%
Belanja Lembur	0	0	0.00%
Jumlah Belanja Kotor	3.589.488.886	3,354,814,987	7%
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.056.156)	(1,850,450)	(43%)
Jumlah Belanja Pegawai (Neto)	3.588.432.730	3,352,964,537	7,02%

Selama TA 2023 terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp (1,056,156) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp (1,850,450) mengalami penurunan 43%. Pengembalian belanja selama TA 2023 berupa pengembalian pembayaran gaji induk pegawai komponen tunjangan fungsional/tunjangan jabatan akibat dari kenaikan/peralihan dari jabatan sebelumnya, sehingga pada pembayaran kekurangan gaji terdapat komponen pengembalian tunjangan jabatan yang telah diterima sebelumnya.

B.4 Belanja Barang

*Belanja
Barang Rp
30.956.755.481*

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 30.956.755.481, dan Rp 23,546,737,696. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 31,47% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini antara lain

disebabkan oleh meningkatnya belanja Barang Non Operasional, Belanja Persediaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dan Belanja Jasa untuk mendukung target output kinerja terlaksananya diklat 3 in 1 untuk 5100 peserta selama tahun 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

Uraian	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (turun)
	(Rp)	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	495.822.400	541,064,500	(6%)
Belanja Barang Non Operasional	7.564.359.750	5,629,336,400	33%
Belanja Persediaan	1.500.000	199,716,300	(99%)
Belanja Jasa	10.242.782.700	9,973,870,875	4%
Belanja Pemeliharaan	523.314.431	342,610,136	45%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.132.507.200	6,868,769,785	90%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0	0	0.00%
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat	0	0	0.00%
Jumlah Belanja Kotor	30.960.286.481	23,555,367,996	31,47%
Pengembalian Belanja	3.531.000	8,630,300	(34)
Jumlah Belanja Barang	30.956.755.481	23,546,737,696	31,47%

Selama TA 2023 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp. (3,531,000) dibandingkan TA 2022 sebesar Rp. (8.630.300) mengalami penurunan sebesar (34%). Pengembalian belanja barang pada TA 2023 merupakan pengembalian atas pembayaran pertanggungjawaban transportasi perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan diklat.

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar *Belanja Modal Rp534.446.100* dan Rp 1.573.854.595. Belanja modal

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal per 31 Desember 2023 adanya penganggaran untuk barang modal berupa Pengadaan Mesin, Peralatan dan Perengkapan Workshop untuk menunjang pelaksanaan Diklat 3 in 1.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	534.446.100	0	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1,573,854,595	(100)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00%
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00%
Jumlah Belanja Kotor	534.446.100	1,573,854,595	(66,04)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00%
Jumlah Belanja Bersih/Neto	534.446.100	1,573,854,595	(66,04)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00. Realisasi tersebut pada TA 2023 tetap sebesar 00 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang industri.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	0	0	0.00
Belanja Modal pengurusan pematangan tanah	0	0	0.00

Belanja Modal perjalanan pengadaan tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih/Neto	0	0	0.00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp534.446.100. Naik sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp 0. Hal ini karena terdapat pengadaan peralatan dan mesin berupa mesin dan peralatan workshop barista, workshop aneka olahan, dan peralatan penunjang kegiatan perkantoran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	534.446.100	0	100%
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0.00%
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	0	0	0.00%
Belanja Modal pemasangan peralatan dan mesin	0	0	0.00%
Jumlah Belanja Kotor	534.446.100	0	100%
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih/Neto	534.446.100	0	100%

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. terdapat

Realisasi Belanja Modal selama pelaksanaan TA 2023 berupa Renovasi dan Rehabilitasi Fasade Gedung kantor serta Atap Aula.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	181,154,000	(100)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	6,200,000	(100)
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	32,626,500	(100)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	1,353,874,095	(100)
Jumlah Belanja Kotor	0	1,573,854,595	(100)
Pengembalian	0	0	0.00%
Jumlah Belanja Bersih/Neto	0	1,573,854,595	(100)

B.5.4 Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00.

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jaringan TA 2023 karena tidak ada penanggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan
Jaruingan Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan	0	0	0.00
Belanja Modal upah dan honor pengelola tehnik Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih/Neto	0	0	0.00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 Rp 00 karena ketiadaan belanja modal lainnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA.2023 dan
TA.2022*

URAIAN JENIS BELANJA	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (Turun) %
Belanja Software	0	0	0
Belanja Buku dan Koleksi Perpustakaan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja Bersih/Neto	0	0	0

*Belanja
Bantuan
Sosial
Rp00*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2023 tetap sebesar 0%

dibandingkan TA 2022. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	-
Rekening Bank	0	-
JUMLAH	0	-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp 0*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp 00 dan Rp00. Kas Lainnya dan Setara Kas meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari mekanisme pembayaran menggunakan LS-Bendahara.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
JUMLAH	0	0

Belanja Dibayar di Muka **C.3 Belanja Dibayar di Muka**

Rp 526.050

Saldo Belanja di bayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 526.050 dan Rp21,643,629. Belanja di bayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayar secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Belanja Pegawai Dibayar Di Muka (Prepaid)	526.050	21,643,629
Belanja Barang Dibayar Di Muka (Prepaid)	0	0
Belanja Modal Dibayar Di Muka (Prepaid)	0	0
Jumlah	526.050	21,643,629

C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih Harus Diterima Rp 00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp00 dan Rp00. Merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun 2023 dan 2022

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	0	0
Pendapatan jasa penggunaan fasilitas ruangan	0	0
Pendapatan jasa pelatihan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan Rp
305.000

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 305.000 dan Rp1,357,060.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahun 2023 dan 2022

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang konsumsi	305,000	1,237,060
Bahan untuk pemeliharaan	0	120,000
Suku cadang	0	0
Bahan Baku	0	0
Barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat	0	0
Persediaan lainnya	0	0
JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN	0	1,357,060

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.6 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR
Rp00

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp00 dan Rp00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu

kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

C.7 Tagihan Penjualan Angsuran

*Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp00*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp00*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak tertagih – Piutang Jangka Panjang Tahun 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	%	Nilai
	Jk Panjang	Penyisihan	Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	--		
Kurang Lancar	--		
Diragukan	--		
Macet	--		
Jumlah Tagihan TP/TGR	--		
Tagihan PA			
Lancar	--		
Kurang Lancar	--		
Diragukan	--		
Macet	--		

Jumlah Tagihan PA	--		
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	--		

C.9 Tanah

Tanah

Rp65.700.000.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Diklat Industri Makassar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp65.700.000.000 dan Rp65.700.000.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai perolehan per 31 Desember 2022	65,700,000,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	0
Penyitaan pengadilan	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	65,700,000,000

C.10 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan

Mesin

Rp19.796.074.849

Nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Diklat Industri Makassar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.796.074.849 dan Rp19,261,628,749.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai perolehan per 31 Desember 2022	19,261,628,749
Mutasi tambah	
Pembelian	534.446.100
Hibah	0
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaan	0
- Koreksi Nilai Aset non revaluasi	0
Saldo per 31 Desember 2023	19.796.074.849

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(16.678.235.952)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	3.117.838.897

Rincian mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin:

No.	Mesin & Peralatan Yang Dibeli	Jumlah	Nilai
1	Rak-Rak Penyimpan	5	Rp12.500.000
2	Brandkas	1	Rp31.652.000
3	LCD Projector/Infocus	3	Rp21.735.000
4	Meja Kerja Kayu	36	Rp104.400.000
5	Kursi Besi/Metal	72	Rp73.620.000
6	Lemari Es	3	Rp24.171.000
7	A.C. Split	4	Rp51.936.000
8	Blender	2	Rp9.407.800
9	Televisi	5	Rp19.690.000
10	Alat Penyangray Kopi	2	Rp54.000.000
11	PC Workstation	5	Rp75.000.000
12	Note Book	3	Rp24.000.000
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Rp25.641.000
14	CCTV - Camera Control Television System	4	Rp6.693.300
JUMLAH			Rp534.446.100

C.11 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp31.110.742.828*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 31.110.742.828 dan Rp 31,005,742,828.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai perolehan per 31 Desember 2022	31,005,742,828
Mutasi Tambah	0
Pembelian	0
Kapitalisasi	105,000,000
Transfer Masuk	
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2023	31.110.742.828
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(8.868.678.634)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	22.242.064.194

Pada TA 2023 terdapat nilai mutasi tambah terjadi terkait transaksi tindak lanjut atas temuan Inspektorat Jenderal terkait pemeliharaan atap kantor yang seharusnya dilakukan kapitalisasi aset senilai Rp105,000,000

C.12 Jalan. Irigasi. dan Jaringan

*Jalan. Jaringan
dan Irigasi
Rp1,474,394,626*

Saldo Jalan. Irigasi. dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,474,394,626 dan Rp1,474,394,626.

Mutasi transaksi terhadap Jalan. Irigasi. dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai perolehan per 31 Desember 2022	1,474,394,626
Mutasi Tambah	0
Pembelian	0
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2023	1,474,394,626
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(1,098,171,427)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	376.223.199

C.13 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp49,700,000*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah. peralatan dan mesin. gedung dan bangunan. jalan. irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp49,700,000 dan Rp49,700,000. sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai perolehan per 31 Desember 2022	49,700,000
Mutasi Tambah	
- Penambahan Aset Tetap Lainnya	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
- Penghapusan	0
- Koreksi Nilai	0
Saldo per 31 Desember 2023	49,700,000

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-49,600,000
Nilai Buku per 31 Desember 2023	100.000

C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00 yang merupakan pembangunan gedung/fasilitas kantor/tempat kerja.

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
Konstruksi Dalam Pekerjaan	0	0	0
	0	0	0

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp (26.694.686.013) dan (25,118,126,546). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023

N O	ASET TETAP	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	19.796.074.849	(16.678.235.952)	3.117.838.897
2	Gedung dan Bangunan	31.110.742.828	(8.868.678.634)	22.242.064.194
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.474.394.626	(1,098,171,427)	376.223.199
4	Aset Tetap lainnya	49.700.000	(49,600,000)	100.000
	TOTAL	52.430.912.303	(26.694.686.013)	25.736.226.290

Rincian Akumulasi penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.16 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud
Rp149,850,000*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp149,850,000 dan Rp149,850,000. Aset Tak Berwujud merupakan Aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Diklat Industri Makassar merupakan Software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud

Saldo Awal per 31 Desember 2022	149,850,000
Mutasi Tambah	
- Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Amortisasi	
Akumulasi Penyusutan	(131.118.750)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	18.731.250

C.17 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp00*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp00 dan Rp613,455,506. Aset Lainnya merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Adapun mutasi Aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2022	613,455,506
Mutasi Tambah	0
- Aset yg tdk digunakan dlm operasi pemerintahan	0
Mutasi Kurang	0
- Penghapusan	613,455,506
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(131.118.750)*

C.18 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(131.118.750) dan Rp(682,770,257). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	149,850,000	(131.118.750)	18.731.250
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	149,850,000	(131.118.750)	18.731.250

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari
KPPN Rp 00*

C.19 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp20.600.835*

C.20 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp20.600.835 dan Rp 69,217,975. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Balai Diklat Industri Makassar per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

URAIAN	Jumlah (Rp.)
Belanja Pegawai yang Masih harus dibayar	0
Belanja Barang Yang masih harus dibayar	20.600.835
Utang kepada pihak ketiga lainnya	0
Total	20.600.835

Adapun rincian utang pihak ketiga yaitu biaya listrik, internet dan telepon sebagai berikut:

KETERANGAN	Jumlah (Rp.)
Gaji Pokok dan THR Pegawai	0
Tunjangan Kinerja	0
Belanja Barang honor Jaspro Diklat	0
Listrik, Telepon, dan Internet	20.600.835
Gaji PPNPN	0
Honor Pengelola dan Output Kegiatan	0
Total	20.600.835

C.21 Utang yang belum ditagihkan

*Utang yang
Belum
ditagihkan*

Nilai Utang yang Belum ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00. Utang yang Belum ditagihkan merupakan

Rp 00

BAST/Kwitansi atas barang maupun jasa yang telah dicatat dalam modul komitmen namun belum dibuat SPPnya.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.22 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 00 dan Rp00. merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan TA 2022

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	0	0
Belanja Barang yang masih harus dibayar	0	0
Belanja Modal yang masih harus dibayar	0	0
Jumlah	0	0

*Utang Jangka
Panjang dalam
Negeri Rp0*

C.23 Utang Jangka Panjang dalam negeri

Utang jangka Panjang dalam negeri per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 00 dan Rp00. merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang memiliki masa tanggungan selama lebih dari 1 tahun atau periode akuntansi. Tidak terdapat Utang jangka Panjang selama periode TA 2022 sampai semester 1 TA 2023

*Ekuitas
Rp
91.435.187.755*

C.24 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 91.435.187.755 dan Rp92,368,536,834. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp 0*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 00 dan Rp 00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan 2022

Uraian	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (Turun)
			%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	
Jumlah PNB	0	0	

Pendapatan anggaran Lain-Lain merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2022. karena keadaan Pandemi Covid-19 yang berangsur-angsur semakin membaik sehingga banyak yang berminat untuk menyewa ruang kelas dan Gedung namun karena digunakan sebagai sarana penunjang diklat maka tidak bisa disewakan atau dipinjam.

D.2 Beban Pegawai

*Beban
Pegawai
Rp3.544.382.680*

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.544.382.680 dan Rp3,376,679,491. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi. baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Kenaikan (turun)
			%
Beban Gaji	1.257.190.320	1,172,546,440	7%
Beban Pembulatan	24,042	21,739	2%
Beban Tunjangan	360.162.990	339,800,307	3
Beban Lembur	0	0	0.00%
Beban uang makan	163.750.950	202,683,850	(13%)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.763.254.378	1,661,627,155	9%
Jumlah Beban	3.544.382.680	3,376,679,491	7,02%

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp2.432.060*

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.432.060 dan Rp 193,371,340. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (turun) (Rp)
Beban Persediaan Konsumsi	2.432.060	193,371,340	(93%)
Beban Persediaan Bahan pemeliharaan	0	0	0%

Beban Persediaan Lainnya	0	0	0%
Jumlah Beban Persediaan	2.432.060	193,371,340	(93%)

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban
Barang dan
Jasa
Rp18.300.524.610*

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.300.524.610 dan Rp16,149,201,186. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya pengurangan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada bulan Januari 2023 s/d bulan September 2023. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (turun) (Rp)
Beban Keperluan Perkantoran	323.712.500	324,622,500	(0,1%)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.889.900	1,962,000	(10%)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	170.220.000	192,720,000	(4,8%)
Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19	0	21,760,000	(100%)
Beban Bahan	6.972.323.150	5,149,486,400	11%
Beban Honor Output Kegiatan	508.100.000	424,850,000	(3,5%)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	83.936.600	54,700,000	(6%)
Beban Langganan Listrik	204.541.760	256,714,697	36%
Beban Langganan Telepon	82.553.300	85,301,714	(2%)
Beban Sewa	1.036.500.000	350,250,000	193%
Beban Jasa Konsultan	5.074.909.500	64,999,300	8700%
Beban Jasa Profesi	3.810.880.000	3,573,640,000	(3%)

Beban Jasa Lainnya	5,481,148,875	5,481,148,875	28%
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	0	167,045,700	(100%)
Jumlah Beban Barang & Jasa	18.300.524.610	16,149,201,186	17%

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp523.434.431*

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 523.434.431 dan Rp. 372,466,136. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya penambahan persediaan suku cadang untuk pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (turun) (Rp)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	391.350.727	195,177,636	200%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105.825.204	114,192,500	(6%)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	33,240,000	(100%)
Beban Pemeliharaan Jaringan	26.138.500	0	100%
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	7,115,000	(100%)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	22,741,000	100%
Jumlah Beban Pemeliharaan	523.434.431	372,466,136	74%

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas*

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar

Rp12.128.976.200 Rp12.128.976.200 dan Rp6,860,139,485. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi dan jumlah diklat yang berkurang dibanding tahun 2022. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (turun) (Rp)
Beban Perjalanan Biasa	8.797.228.600	5,207,559,885	66%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.350.000	387,829,600	(97%)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.321.397.600	1,264,750,000	256%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0.00%
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	12.128.976.200	6,860,139,485	93%

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban
Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Balai Diklat Industri Makassar untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat terkait industri. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (turun) (Rp)
Beban peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat	0	0	0.00%
Beban barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	0	0	0%
Jumlah Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0%

Pada saat awal transaksi penginputan persediaan, operator persediaan kami salah menginput akun belanja barang persediaan berupa materai untuk keperluan kantor dicatat menjadi barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Jumlah kesalahan penginputan persediaan sebesar Rp 550.000. Pada 31 Desember sudah dilakukan jurnal manual untuk menghapus Nilai beban barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp00
Bantuan Sosial Rp00

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada perubahan nilai pada beban bantuan sosial. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (turun) (Rp)
Beban Sosial untuk Rehabilitas Sosial	0	0	0.00%
Beban Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0.00%
Beban Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0.00%
Jumlah Beban Bantuan Sosial	0	0	0.00%

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban

Penyusutan

dan

Amortisasi

Rp1.615.487.428

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.615.487.428 dan Rp 1,802,654,160. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (turun) (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	871.623.582	1,090,602,754	(21%)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	686.409.544	654,597,105	(3%)

Beban Penyusutan Jalan & Jembatan	0	0	0.00%
Beban Penyusutan Irigasi	7,944,734	7,944,733	0%
Beban Penyusutan Jaringan	12,047,068	12,047,068	0.00%
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	0.00%
Jumlah Penyusutan	1.578.024.928	1,765,191,660	(9%)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	37,462,500	37,462,500	0.00%
Beban Penyusutan aset lain-lain	0	0	0.00%
Jumlah Amortisasi	0	0	0.00%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.615.487.428	1,802,654,160	(12%)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp00*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (turun) (Rp)
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih-Piutang Lancar	0	0	0.00%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih piutang Non Lancar	0	0	0.00%
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0.00%

D.11 Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp00*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (turun) (Rp)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0.00%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0.00%
Jumlah Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0.00%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	00	00	(100%)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	(100%)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	(100%)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	(100%)
Surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	(100%)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	(100%)

Nilai Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional Sebesar Rp. 00 tidak terdapat transaksi yang mempengaruhi kegiatan non operasional.

D.12 Pos Luar Biasa

*Pos Luar
Biasa Rp00*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Naik (turun) (Rp)
Pendapatan Pos Luar Biasa	0	0	0.00%
Beban Pos Luar Biasa	0	0	0.00%
Surplus (defisit) Pos Luar Biasa	0	0	0.00%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp92.407.657.620

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp92.407.657.620 dan Rp92,650,311,660.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp(36.111.462.508)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(36.111.462.508) dan Rp(28,755,177,654). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp00

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp00 dan Rp00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp00*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp(12,585,691). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang terkait dengan reklasifikasi.

*Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp00*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00. Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi sebidang tanah milik Balai Diklat Industri Makassar.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp109.118.361*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp109.118.361 dan Rp38,454,930. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

*Koreksi Lain-Lain
Rp(2.159.200)*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(2.159.200) dan Rp00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara. antara lain koreksi atas pendapatan. koreksi atas beban. koreksi atas hibah. piutang dan utang.

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi
Antar Entitas
Rp35.032.033.482*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp35.032.033.482 dan Rp28,473,402,828. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL. antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1.Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023. DDEL sebesar Rp47.600.829 sedangkan DKEL sebesar Rp35.079.634.311.

E.4.2.Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Nilai Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0. Tidak ada transaksi transfer masuk ataupun transfer keluar aset/kewajiban dari entitas lain pada periode ini.

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp00-. dari total Rp00.- yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp91.435.187.755

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp91.435.187.755 dan Rp92,407,657,620.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional satuan kerja di lingkungan Belanja Subsidi Balai Diklat Industri Makassar adalah:

Bank Rakyat Indonesia Cabang Somba Opu Makassar dengan Nomor Rekening: 0343.01.000362.30-9

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada Tahun Anggaran 2018 telah terbit Permenperin No. 35 Tahun 2018 yang berdampak pada berubahnya nomenklatur dan susunan satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Salah satu perubahan yang diakibatkan oleh terbitnya Permenperin tersebut adalah adanya perubahan Kode Satker Balai Diklat Industri Makassar dari Kode Satker 019.01.248543 menjadi Kode Satker 019.01. 579341.

Hal ini mendasari dilakukannya likuidasi atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Diklat Industri Makassar (019.01.248543) ke Satuan Kerja Balai Diklat Industri Makassar (019.01. 579341) yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2020 yang lalu.

Dengan adanya likuidasi tersebut. dilakukan pemindahan atas Aset dan Kewajiban dari Satuan Kerja Balai Diklat Industri Makassar (019.01.248543) ke Satuan Kerja Balai Diklat Industri Makassar (019.01. 579341) yang dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 1426/248543/05/2022 tanggal 31 Mei 2019 (dilampirkan

pada laporan keuangan tahun 2019).

Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Makassar (Kode Satker 019.10.579341) periode Semester 1 Tahun Anggaran 2023 ini menyajikan aset dan kewajiban serta transaksi keuangan sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Penunjukan PPK, PPSPM, dan bendahara:

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Balai Diklat Industri Makassar Nomor 207, 208, 209, 210 Tahun 2022 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Diklat Industri Makassar Tahun Anggaran 2023 tanggal 31 Desember 2022.

F.3 PELAKSANAAN MIGRASI SALDO AWAL

Pada bulan Juli tahun 2023 telah dilaksanakan migrasi data saldo awal untuk persediaan, Aset Tetap (BMN), dan General Ledger (Neraca) dari aplikasi e-Rekon LK ke Aplikasi SAKTI. Data hasil migrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan implementasi SAKTI pada Satker Balai Diklat Industri Makassar. Hasil migrasi dituangkan dalam berita Acara Migrasi Saldo Persediaan, BMN, dan Buku Besar Neraca terlampir.

Lampiran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-019.10.2.579341/2023

Unit Organisasi : (10) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (19.51) SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR KPPN : (054) Makassar I

Satuan Kerja : (579341) BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00092/DRPP/579341/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	660.684.400,00	3.584.723.485,00	4.245.407.885,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	660.684.400,00	3.584.723.485,00	4.245.407.885,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	660.684.400,00	1.474.262.285,00	2.134.946.685,00	0,00
	1. BP UP*)	210.000.000,00	132.179.800,00	342.179.800,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	450.684.400,00	1.323.522.000,00	1.774.206.400,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	18.560.485,00	18.560.485,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	0,00	
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

- 1.
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



BAGUS HERRY

III/d 196605121990031005



KOTA MAKASSAR, Desember 2023

Bendahara Pengeluaran



Milka Pasongli, SE

III/d 198003052009012007

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 29 bulan Desember tahun 2023, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 651925793411000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00092/DRPP/579341/2023

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3	Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)			Rp. 0

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	0
2	Saldo BP TUP	Rp.	0
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4	Saldo Pajak	Rp.	0
5	Saldo Hibah	Rp.	0
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)			Rp. 0

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0
----	---------------------------	-----	---

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3 Jumlah Kas (A1+A2)			Rp. 0

B.	Selisih Kas (I.A-II.A.3)	Rp.	0
----	--------------------------	-----	---

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP			Rp. 0
2	a. Saldo TUP	Rp.	0
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP			Rp. 0
3	Saldo Lainnya	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)			Rp. 0

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)			Rp. 0

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0
----	---	-----	---

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Milka

Milka Pasongli, SE
III/d 198003052009012007

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



BAGUS HERRY
III/d 196605121990031005

BERITA ACARA STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN

Nomor : B/19/BPSDMI/BDI-Makassar/BMN/1/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga. Bertempat di Balai Diklat Industri Makassar. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : La Ode Saharun
NIP : 197804012009101001
Jabatan : Petugas Gudang

Telah melaksanakan kegiatan *Stock Opname* terhadap barang persediaan yang disimpan dalam Gudang Satuan Kerja Balai Diklat Industri Makassar yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.17 Kel.Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar dengan perincian sebagaimana terlampir dalam Register Transaksi Harian Barang Persediaan (Opname Fisik) untuk **Periode Bulan Desember 2023**.

Demikianlah berita acara ini dibuat dalam rangkap 1 (satu) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Makassar, 5 Januari 2024
Petugas Gudang



La ode Saharun
Nip. 197804012009101001

REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)

UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023

KODE UAKPB : 019.10.1900.579341.000.KD

Tanggal : 12-01-2024

UAKPB : BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR

Halaman : 1 dari 72

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
019101900579341000KD202300002P	31-12-2023	1010301003	000135	Binder Clips [Joyco]	Kotak	2023-12	2
019101900579341000KD202300002P	31-12-2023	1010302001	000115	Kertas HVS A4 70 grm	Riem	2023-12	2
019101900579341000KD202300002P	31-12-2023	1010302001	000117	Kertas HVS F4 70 grm	Riem	2023-12	1
019101900579341000KD202300002P	31-12-2023	1010304004	000143	Tinta Refill Epson 664	Botol	2023-12	1

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (579341) BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 8:43 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,544,382,680	3,376,679,491	167,703,189	4.967
Beban Persediaan	2,432,060	193,371,340	(190,939,280)	(98.742)
Beban Barang dan Jasa	18,300,524,610	16,149,201,186	2,151,323,424	13.322
Beban Pemeliharaan	523,434,431	372,466,136	150,968,295	40.532
Beban Perjalanan Dinas	12,128,976,200	6,860,139,485	5,268,836,715	76.804
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (579341) BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 8:43 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,615,487,428	1,802,654,160	(187,166,732)	(10.383)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	36,115,237,409	28,754,511,798	7,360,725,611	25.599
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(36,115,237,409)	(28,754,511,798)	(7,360,725,611)	25.599
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	3,658,501	0	3,658,501	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	28,000,000	0	28,000,000	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	24,341,499	0	24,341,499	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	116,400	0	116,400	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	116,400	0	116,400	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3,774,901	0	3,774,901	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(36,111,462,508)	(28,754,511,798)	(7,356,950,710)	25.585
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(36,111,462,508)	(28,754,511,798)	(7,356,950,710)	25.585

Keterangan :

FINAL

Makassar, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

BAGUS HERRY

196605121990031005

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (579341) BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 8:46 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	92,407,657,620	92,650,311,660	(242,654,040)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(36,111,462,508)	(28,754,511,798)	(7,356,950,710)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	106,959,161	38,454,930	68,504,231	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	109,118,361	38,454,930	70,663,431	-
LAIN-LAIN	(2,159,200)	0	(2,159,200)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	35,032,033,482	28,473,402,828	6,558,630,654	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(972,469,865)	(242,654,040)	(729,815,825)	-
EKUITAS AKHIR	91,435,187,755	92,407,657,620	(972,469,865)	-

Keterangan :

FINAL

Makassar, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

BAGUS HERRY
196605121990031005

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 019
ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI 10
SATUAN KERJA : BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR 579341

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 8:51 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	35,208,413,000	35,079,634,311	(128,778,689)	100	28,806,130,000	28,473,556,828	(332,573,172)	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Makassar, 19 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

BAGUS HERRY
196605121990031005

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 019
ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI 10
SATUAN KERJA : BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR 579341

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 8:52 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	35,208,413,000	35,079,634,311	(128,778,689)	100	28,806,130,000	28,473,556,828	(332,573,172)	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Makassar, 19 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

BAGUS HERRY
196605121990031005

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (579341) BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 9:01 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	526,050	21,643,629	(21,117,579)	(97.57)
Persediaan	305,000	1,357,060	(1,052,060)	(77.52)
JUMLAH ASET LANCAR	831,050	23,000,689	(22,169,639)	(96.39)
ASET TETAP				
Tanah	65,700,000,000	65,700,000,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	19,796,074,849	19,261,628,749	534,446,100	2.77
Gedung dan Bangunan	31,110,742,828	31,005,742,828	105,000,000	0.34
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,474,394,626	1,474,394,626	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	49,700,000	49,700,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(26,694,686,013)	(25,118,126,546)	(1,576,559,467)	6.28
JUMLAH ASET TETAP	91,436,226,290	92,373,339,657	(937,113,367)	(1.01)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	149,850,000	149,850,000	0	0.00
Aset Lain-lain	0	613,455,506	(613,455,506)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(131,118,750)	(682,770,257)	551,651,507	(80.80)
JUMLAH ASET LAINNYA	18,731,250	80,535,249	(61,803,999)	(76.74)
JUMLAH ASET	91,455,788,590	92,476,875,595	(1,021,087,005)	(1.10)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	20,600,835	69,217,975	(48,617,140)	(70.24)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	20,600,835	69,217,975	(48,617,140)	(70.24)
JUMLAH KEWAJIBAN	20,600,835	69,217,975	(48,617,140)	(70.24)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	91,435,187,755	92,407,657,620	(972,469,865)	(1.05)
JUMLAH EKUITAS	91,435,187,755	92,407,657,620	(972,469,865)	(1.05)
JUMLAH EKUITAS	91,435,187,755	92,407,657,620	(972,469,865)	(1.05)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	91,455,788,590	92,476,875,595	(1,021,087,005)	(1.10)

Keterangan :

FINAL

Makassar, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

BAGUS HERRY
196605121990031005

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (579341) BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 10:17 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114111	Beban Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	526,050	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	305,000	0
0.0	131111	Tanah	65,700,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	19,796,074,849	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	31,110,742,828	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	829,190,000	0
0.0	134112	Irigasi	283,792,626	0
0.0	134113	Jaringan	361,412,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	49,700,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	16,678,235,952
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	8,868,678,634
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	829,190,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	99,110,515
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	169,870,912
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	49,600,000
0.0	162151	Software	149,850,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	131,118,750
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	20,600,835
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	35,079,634,311
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	47,600,829	0
0.0	391111	Ekuitas	0	92,407,657,620
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	109,118,361
0.0	391119	Koreksi Lainnya	2,159,200	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	28,000,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	116,400
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,191,927,320	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	22,451	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	74,754,498	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	22,063,382	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,020,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	110,272,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,886,900	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	68,364,480	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	151,984,950	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	38,595,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	65,263,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,591	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,076,550	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (579341) BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 10:17 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	11,030,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,100,180	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	11,766,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,657,251,149	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	106,003,229	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	323,712,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,889,900	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	170,220,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	6,972,323,150	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	508,100,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	83,936,600	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	204,541,760	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	82,553,300	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	28,305,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,036,500,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,810,880,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	5,074,909,500	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	391,350,727	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105,825,204	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	26,138,500	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8,797,228,600	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,350,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,321,397,600	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	871,623,582	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	686,409,544	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	7,944,734	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	12,047,068	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	37,462,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,432,060	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	120,000	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2,652,900	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	24,341,499	0
JUMLAH			154,470,932,290	154,470,932,290

Keterangan :

FINAL

Makassar, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

BAGUS HERRY

196605121990031005

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (579341) BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 10:17 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	35,079,634,311
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	47,600,829	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	28,000,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	19,484,429
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	116,400
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,191,927,320	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,607	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	74,754,498	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22,063,382	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	132,172,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5,886,900	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	68,364,480	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	152,511,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	38,595,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	65,263,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,591	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,076,550	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	11,030,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,100,180	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	11,766,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,679,751,149	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	106,003,229	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	301,212,500	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,889,900	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	192,720,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	6,972,323,150	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	508,100,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	83,936,600	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,500,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	209,634,900	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	82,553,300	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	28,305,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,036,500,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,810,880,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	5,074,909,500	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	391,350,727	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105,825,204	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (579341) BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 10:17 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	26,138,500	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,800,759,600	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,350,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,321,397,600	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	534,446,100	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	156
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	180,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	876,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	3,531,000
JUMLAH			35,131,822,296	35,131,822,296

Keterangan :

FINAL

Makassar, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

BAGUS HERRY

196605121990031005



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 579341
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	35,208,413,000	35,208,413,000	0
2	Belanja	35,084,221,467	35,084,221,467	0
3	Pengembalian Belanja	-4,587,156	-4,587,156	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	47,600,829	47,600,829	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21-JAN-24

